

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi serta TPST Bantar Gebang, yaitu meliputi demografi, geografi, demografi serta kondisi pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta serta Kota Bekasi. Termasuk demografi dan geografi dari TPST Bantar gebang.

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia. Merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana di bidang pendidikan, budaya, olah raga, dan kesehatan. Jakarta merupakan gerbang utama Indonesia. Letaknya yang strategis di Kepulauan Indonesia, menyediakan layanan angkutan darat, udara, dan laut terbaik di Indonesia.

2.1.1 Gambaran Geografis

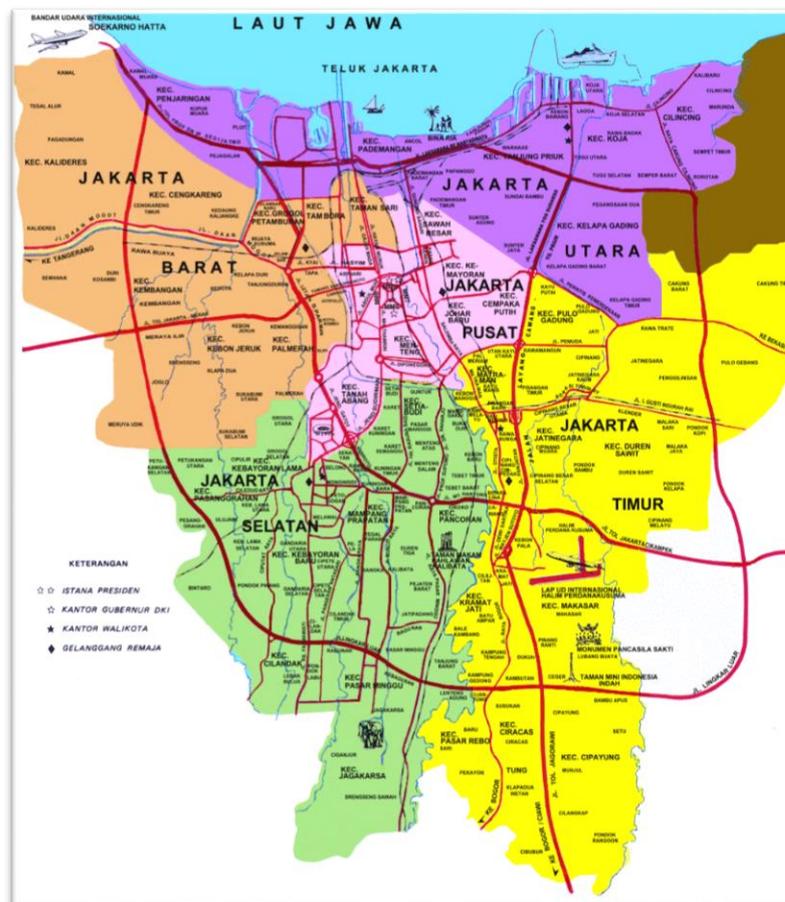
Penjelasan terkait dengan kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta oleh penulis adalah untuk memberikan informasi secara mendetail terkait dengan lokasi penelitian penulis, mulai dari batas administrasi daerah, luas wilayah, dan topografi. Penjelasan terakait kondisi geografis ini bertujuan agar pembaca memahami dengan baik lokasi penelitian. Maka dari itu, penulis menyajikan penjelasan kondisi geografis lokasi sesuai dengan data terbaru Provinsi DKI Jakarta.

A. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas

145,73 km², dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.²⁵

Gambar 2.1
Peta Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Pemprov DKI Jakarta 2008

²⁵Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012

B. Topografi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleistosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian aleuvial Bogor yang terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 m, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40m.

2.1.2 Kondisi Pemerintahan

A. Pembagian Wilayah Administrasi

Wilayah yang dikaji pada pekerjaan Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta meliputi 5 (lima) wilayah Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Sedangkan Kabupaten Administrasi Pulau Seribu tidak termasuk dalam kajian ini. Tiap wilayah administrasi terdiri atas Kecamatan dan Kelurahan. Tiap kelurahan terdiri dari para Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT). Saat Ini Provinsi DKI Jakarta terdapat 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan. Data Nama Kecamatan dan Kelurahan di tiap Wilayah Administrasi disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Wilayah Administrasi dan Kecamatan DKI Jakarta

| No | Wilayah Administrasi | Kecamatan |
|----|----------------------|--|
| 1. | Jakarta Pusat | 1. Tanah Abang 2. Menteng 3. Senen 4. Johar Baru 5. Cempaka Putih 6. Sawah Besar 7. Gambir 8. Kemayoran |
| 2. | Jakarta Utara | 1. Penjaringan 2. Pademangan 3. Tanjung Priuk 4. Koja 5. Kelapa Gading 6. Cilincing |
| 3. | Jakarta Barat | 1. Kembangan 2. Kebon Jeruk 3. Palmerah 4. Grogol Petamburan 5. Kali deres 6. Tambora 7. Tamansari 8. Cengkareng |
| 4. | Jakarta Selatan | 1. Jagakarsa 2. Pasar Minggu 3. Pesanggrahan 4. Cilandak 5. Kebayoran Lama 6. Kebayoran Baru 7. Mampang Prapatan 8. Pancoran 9. Tebet 10. Setiabudi |
| 5. | Jakarta Timur | 1. Pasar Rebo 2. Ciracas 3. Cipayung 4. Makasar 5. Kramat Jati 6. Jatinegara 7. Duren Sawit 8. Cakung 9. Pulo Gadung 10. Matraman |

Sumber: BAPPEDA Provinsi DKI Jakarta (2015)

Jakarta Pusat

Kota Administratif Jakarta Pusat adalah pusat dari Provinsi DKI Jakarta karena letaknya yang berada di tengah provinsi. Pada kota administratif ini terdapat Istana Negara Indonesia yang terletak di Jalan Merdeka, termasuk 2 stasiun besar di Jakarta yaitu Stasiun Gambir dan Stasiun Senen, ada pula ikon Jakarta yaitu Monumen Nasional yang biasa disingkat menjadi “Monas” berada tidak jauh dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat memiliki 8 Kecamatan seperti yang tertera di Tabel 2.1, ada 44 kelurahan di Jakarta Pusat ini. Untuk pengelolaan sampah sendiri di Jakarta Pusat mempunyai beberapa TPS yaitu contohnya TPS yang berada di Kecamatan Menteng, walaupun hanya berbentuk container dan bak beton karena semua sampah dari DKI Jakarta dibawa ke TPST Bantar Gebang. Lahan di Jakarta Pusat paling banyak digunakan untuk perumahan sesuai data dari tribus Peta Penggunaan Lahan Jakarta Pusat 2008 43,82% lahan di Jakarta Pusat adalah Perumahan atau pemukiman tidak kaget bahwa sampah di Jakarta Pusat adalah bentuk sampah rumah tangga.

Jakarta Utara

Wilayah kotamadya Jakarta Utara mempunyai luas 139,56 Km². Hingga tahun 2006 memiliki jumlah penduduk 1.452.285 jiwa yang terdiri dari 721.865 jiwa pria dan 730.420 jiwa wanita, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,32%, terdapat 6 kecamatan dan 32 Kelurahan²⁶. Jakarta Utara adalah Kota Administratif yang berada paling Utara di Provinsi DKI Jakarta ini Di Jakarta Utara terdapat Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Balaikota lama Kota Batavia yang sekarang disebut museum Kota Jakarta. Potensi ekonomi DKI Jakarta sesungguhnya sangat kuat dimiliki Jakarta Utara, Di sini ada pelabuhan yang menjadi simpul utama aktivitas ekspor impor semua komoditas strategis bagi negara. Juga ada pergudangan, kawasan industri atau pabrik, daerah wisata pantai teramai, dan daerah tangkapan

²⁶ Badan Pusat Statistik Jakarta Utara Tahun 2011

air. tidak heran ekonomi disini bersangkutan dengan pesisir pantai dan keluar masuk kapal yang yang ingin berlabuh di DKI Jakarta ini. Pada awalnya di Jakarta Utara terdapat TPST Sunter untuk menampung sampah di DKI Jakarta tetapi pada tahun 2017 TPST itu ditutup karena untuk persiapan Intermediate Treatment Facilities atau disingkat menjadi ITF yang kelak diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang.

Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat adalah salah satu dari 5 kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada di Kembangan. Jakarta Barat secara administratif terbagi menjadi 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Pemukiman di daerah sangat padat penduduk seperti Kelurahan Kali Anyar sudah tidak layak huni dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Pengelolaan sampah di Jakarta Barat Sudah cukup baik bahkan masyarakat sudah mulai sadar akan sampah, contohnya hal yang dilakukan oleh warga Slipi yang memisahkan sampah organik dan non organik, biasanya warga memilah sampah yang digunakan lalu dimasukan ke dalam karung baru setelah itu dibuang ke tempat sampah yang biasanya di ambil oleh para petugas kebersihan untuk dibawa ke TPST Bantar Gebang²⁷

Jakarta Selatan

Kota Administratif Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan, berada di belahan selatan banjir kanal, dengan penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Tebet dan penduduk terjarang terdapat di Kecamatan Cilandak. Jakarta Selatan merupakan daerah pemukiman. Dengan kondisi lingkungan yang hijau, teduh dan tenang, menjadikan wilayah ini sebagai pilihan golongan ekonomi atas dan warga asing untuk bermukim. Hal ini terlihat dari

²⁷*Detik News*, 24 November 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3353728/blusukan-ke-slipi-djarot-terkesan-dengan-pengelolaan-sampah-warga>. Diakses 12 Januari 2017 Pukul 14.21 WIB

munculnya pemukiman golongan ini di berbagai bagian wilayah Jakarta Selatan, seperti Setiabudi, Pondok Indah, Permata Hijau, Kebayoran Baru, dan Kemang.

Jakarta Timur

Jakarta timur memiliki 10 kecamatan yang berpenduduk 2.121.280 jiwa, sehingga wilayah ini menempati jumlah penduduk terbanyak di DKI Jakarta. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Duren Sawit sebanyak 315.463 jiwa dan kecamatan Pulo Gadung sebanyak 279.704 jiwa. Namun jika dilihat dari segi kepadatan penduduk kecamatan Matraman dan Jatinegara memiliki tingkat intensitas kepadatan yang tinggi yaitu 40.034,64 jiwa dan 24.492,14 jiwa per km². Total kepadatan penduduk wilayah Jakarta Timur adalah 11.292,41 Jiwa per km². Di Jakarta Timur memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan.²⁸ Dengan penduduk yang padat seperti ini tidak heran jumlah sampah dari daerah ini paling banyak di antara daerah yang lain yaitu sekitar 1600 ton perhari.²⁹

B. Perangkat Pemerintahan

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara Indonesia memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Dengan menyangkut status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat provinsi.

Dalam struktur wilayah administrasi Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 dari 5 kotamadya menjadi 1 (satu) kabupaten administrasi dibawahnya, yang juga mengalami pemekaran yang semula 43 Kecamatan menjadi 44 Kecamatan, dan dari 265 kelurahan menjadi 267 kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang

²⁸ Badan Pusat Statistik Jakarta Timur Tahun 2012

²⁹ Dinas Lingkungan Hidup, *Rekap Data Sampah Dinas Lingkungan Hidup*. Tahun 2016

mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah otonom dan ibukota negara. Salah satu pasalnya mengatur Pemprov DKI dipimpin kepala daerah, untuk masa berlaku 5 tahun.³⁰

Pada awal tahun 2017 tepatnya dimulai tanggal 1 Januari 2017 terdapat perubahan struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 salah satunya yang terjadi pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta yang berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Perubahan ini bermaksud untuk merampingkan struktur organisasi yang ada di provinsi DKI Jakarta, merampingkan 53 SKPD menjadi 42 Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, pengurangan itu meliputi beberapa hal. Awalnya, ada 5 asisten dan 10 biro di Sekretariat Daerah. Kini berkurang menjadi 4 asisten dan 10 biro. Lembaga Teknis Daerah semula berjumlah 18, kini menjadi 8 badan.

Jumlah Dinas sebelumnya ada 20, kini menjadi 22 karena ada penggabungan 22 Dinas, 1 Satpol PP, dan 1 BPBD. Sementara itu, jumlah kabupaten atau kota administrasi tetap yaitu 6. Lembaga lain yang semula berjumlah 5 menjadi 1 lembaga saja. Kemudian, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tetap memiliki 1 perangkat.

Berikut ini adalah nama dinas yang mengalami perubahan nomenklatur ataupun mengalami penggabungan, Dinas Tata Air menjadi Dinas Sumber Daya Air (perubahan nomenklatur); Dinas Penataan Kota menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (perubahan nomenklatur); Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (perubahan nomenklatur); Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (urusan kehutanan pindah ke Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman); Badan Pengelola lingkungan hidup Daerah dan Dinas

³⁰ Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2016) *Jakarta Dalam Angka 2016*. BPS Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Hal 32

Kebersihan menjadi Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan (penggabungan 2 SKPD); Dinas Perhubungan dan Transportasi menjadi Dinas Perhubungan (perubahan nomenklatur); Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (penambahan urusan statistik dan persandian); Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (pengintegrasian urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan)

Setelah itu ada Dinas Olah Raga dan Kepemudaan menjadi Dinas Pemuda dan Olah Raga (perubahan nomenklatur); Dinas Pertamanan dan Pemakaman menjadi Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman (perubahan nomenklatur dan penambahan unsur kehutanan); Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah (pemisahan menjadi 2 SKPD); Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (penambahan tugas dan fungsi pengelolaan retribusi daerah); Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal menjadi Badan Pembina BUMD (pengalihan urusan penanaman modal); Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menjadi Badan Kepegawaian Daerah (penggabungan 2 SKPD); Badan Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (perubahan nomenklatur).

Adapun, SKPD yang tidak mengalami perubahan apapun adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan. (Baca: Sumarsono Yakin Perampingan SKPD Tak Akan Ganggu Pelayanan Publik) Ada juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Perindustrian dan Energi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Wilayah kabupaten dan kota administrasi juga tidak berubah. Kawasan itu tetap disebut Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Sementara itu, ada beberapa SKPD yang menjadi Unit Pelayanan Teknis di antaranya Kantor Pengelola Kawasan Monas, Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, RSUD Tarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih, RSUD Pasar Minggu, RSUD Koja, RSKD Duren Sawit, dan Sekretariat Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta.³¹

2.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2009 berdasarkan hasil proyeksi penduduk DKI sebanyak 9.5 juta jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 2.311.535 rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga adalah 3,99 orang. Dengan luas wilayah 662,33 km² berarti kepadatan penduduknya mencapai 13,9 ribu/km², sehingga menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah terpadat penduduknya di Indonesia. Pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 1,13 % pada periode 2005-2008 menjadi 1,06 % pada periode tahun 2005-2009. Data jumlah penduduk, jumlah kecamatan dan kelurahan serta luas di masing-masing wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

³¹ *Kompas*, 6 Juli 2016. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/15/06200171/ini_perubahan-perubahan.nama.skpd.di.pemprov.dki.awal.tahun.depan . Dikses tanggal 21 Januari 2017 pukul 19.35.

Tabel 2.2

Data Wilayah Administrasi dan Pemerintahan Di Propinsi DKI Jakarta

| No. | Wilayah Administrasi | Luas Wilayah (KM2) | Jumlah Kecamatan | Penduduk 2010 |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. | Jakarta Pusat | 48,13 | 8 | 898.883 |
| 2. | Jakarta Utara | 146,66 | 6 | 1.645.312 |
| 3. | Jakarta Timur | 188,03 | 10 | 2.687.027 |
| 4. | Jakarta Selatan | 141,27 | 10 | 2.057.080 |
| 5. | Jakarta Barat | 129,54 | 8 | 2.278.825 |
| 6. | Kepulauan Seribu | 8,7 | 2 | 21.071 |
| Jumlah | | 662,33 | 4 | 9.588.198 |

Sumber: Sensus Penduduk DKI Jakarta (2010)

2.1.4 Sosial Budaya Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta memiliki penduduk lebih dari 300 suku bangsa dengan 200 bahasa. Sebagai Ibukota Negara republik Indonesia, Jakarta merupakan titik pertemuan budaya nasional dan internasional. Jakarta menjadi barometer perkembangan budaya bangsa Indonesia. Berbagai atraksi budaya, kuliner, dan seni ditampilkan secara rutin dalam berbagai event kebudayaan di Pusat Kota Jakarta. Negara Indonesia yang berbasis negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 13.000 pulau dan penduduk kurang lebih sebanyak 200 juta jiwa, memiliki kebhinekaan dalam suku bangsa, bahasa, budaya serta adat dan agama. Kebhinekaan tersebut tercermin pula di ibukota negara, Jakarta. Jakarta dewasa ini memiliki hampir 10 juta jiwa, Jakarta merupakan salah satu kota di Asia yang paling sering di bicarakan dengan berbagai alasan yang wajar. Salah satu yang menjadi motor penggerak perekonomian DKI Jakarta adalah sektor perdagangan jasa. Sektor itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi DKI Jakarta.

Mengenal sosial budaya suku betawi adalah suku asli di Jakarta berasal dari perkawinan antaretnis dan bangsa di masa lalu, tapi mulai tersingkirkan maka didirikanlah cagar budaya Situ Babakan. Secara biologis orang-orang betawi berdarah campuran aneka suku bangsa yang didatangkan Belanda ke Batavia. Lahir dari perpaduan Sunda, Jawa, Arab, Bali, Sumbawa, Ambon, Melayu dan Tionghoa. Masyarakat Jakarta adalah masyarakat dengan multi budaya

yang kental, maka sering mengalami perubahan sosial budaya baik positif maupun negatif, Jakarta merupakan tempat lintas budaya antar bangsa tidak heran jika kemajuan globalisasi di Jakarta sangat pesat diikuti dengan perkembangan teknologi yang pesat juga maka dari itu kebanyakan masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang modern.

2.2 Gambaran Umum Kota Bekasi

Kota Bekasi adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi sendiri berasal dari kata *Bagasasi* yang artinya sama dengan *Candrabaga* yaitu nama sungai yang melewati kota ini, nama ini tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara. Kota Bekasi ini merupakan bagian dari megapolitan “JABODETABEK” dan menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di Indonesia sebanyak 2.334.871 jiwa, serta menjadi kota terpadat kesepuluh di Indonesia dengan kepadatan 11.000 jiwa/km². Penjelasan terkait dengan kondisi geografis Kota Bekasi oleh penulis adalah untuk memberikan informasi secara mendetail terkait dengan lokasi penelitian penulis, mulai dari batas administrasi daerah, luas wilayah, dan topografi. Penjelasan terkait kondisi geografis ini bertujuan agar pembaca memahami dengan baik lokasi penelitian. Penulis menyajikan penjelasan kondisi geografis lokasi sesuai dengan data terbaru Kota Bekasi.

2.2.1 Gambaran Geografi

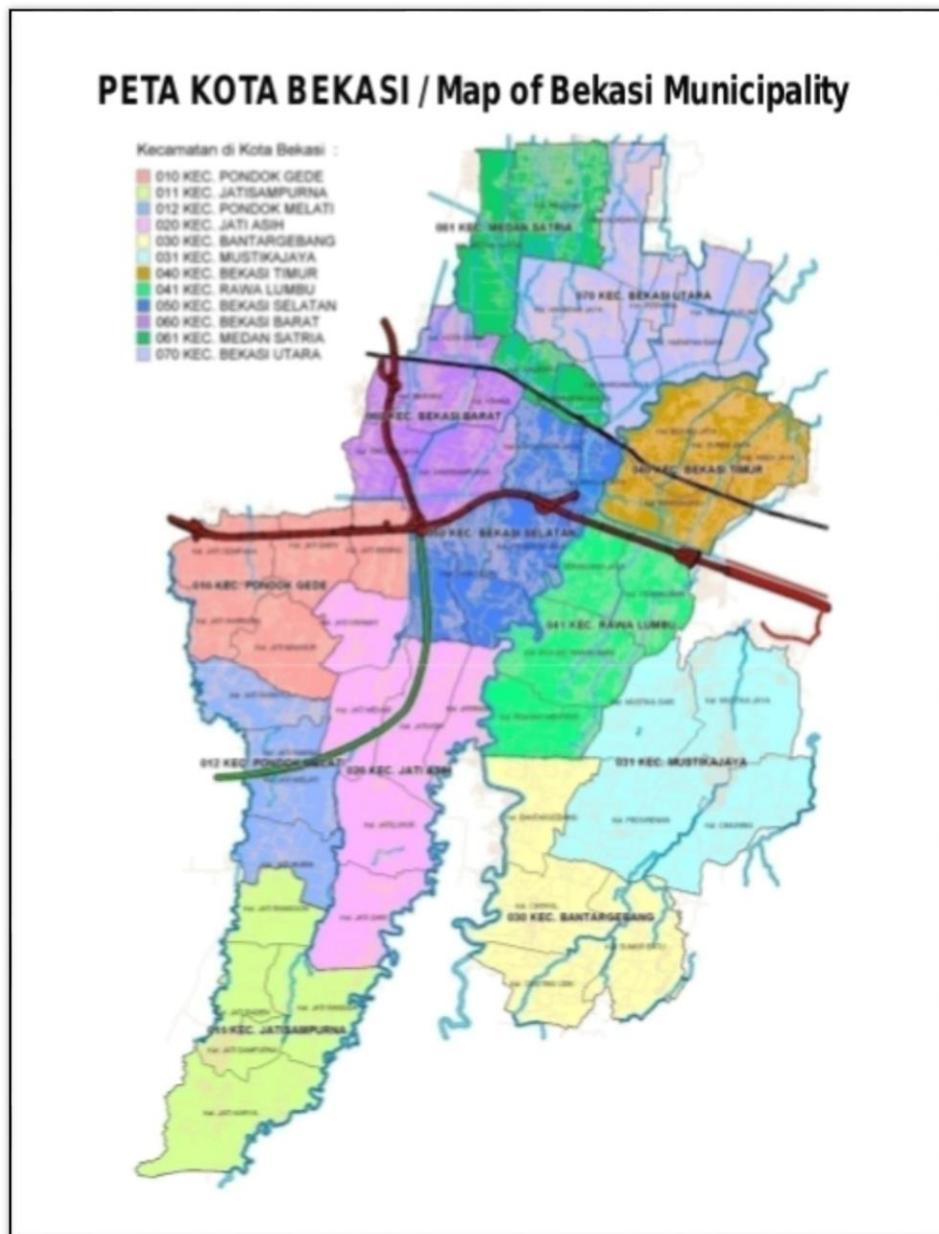
A. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Secara geografis wilayah Kota Bekasi berada pada posisi 106°48'28" hingga 107°27'29" Bujur Timur (BT) dan 06°10'06"- 06°30'06" Lintang Selatan (LS). Secara administratif Kota Bekasi terbagi atas 12 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Pondok Gede,

Jati Sampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, dan Kecamatan Bekasi Utara.³²

Gambar 2.2

Peta Kota Bekasi



Sumber: Pemerintah Kota Bekasi. (2009)

³² Bappeda (2013). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi*. Bekasi: Bappeda. Hal.2

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekita 210,49 km², dengan batas wilayah Kota Bekasi sebelah utara Kota Bekasi terdapat Kabupaten Bekasi lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, di Barat bersebelahan dengan Provinsi DKI Jakarta tepatnya Jakarta Utara dan Jakarta Timur, dan terakhir di sebelah timur adalah Kabupaten Bekasi.

B. Topografi

Kota Bekasi terletak pada ketinggian 19 meter dari permukaan laut (mdpl), yang memiliki kondisi topografi yang relatif datar oleh karena itu daerah Kota Bekasi termasuk dalam satuan dataran rendah yang memiliki potensi banjir cukup tinggi (SLHD Kota Bekasi dari BPS Kota Bekasi, 2010). Ketinggian kurang dari 25 meter berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondok gede. Sedangkan ketinggian antara 25–100 meter dpl berada di Kecamatan Bantar Gebang, Pondok Melati, dan Jatiasih. Morfologi regional Kota Bekasi relatif datar dengan kemiringan antara 0 – 2 %, dengan bentuk miring ke utara, dan menempati daerah yang paling luas di bagian tengah dan utara sampai ke pantai. Struktur lahan di Kota Bekasi mayoritas terdiri atas daerah datar yang berawa.³³

2.2.2 Kondisi Pemerintah

A. Pembagian Wilayah Administrasi

Berdasarkan data pada tahun 2000, wilayah Kota Bekasi memiliki luas sebesar 21.049 Ha dan terdiri dari 10 kecamatan serta 52 kelurahan/desa. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi maka pada tahun 2005, Kota Bekasi mengalami pemekaran dari 10 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Hasil pemekaran tersebut adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.3

³³ *Ibid.* Hal.3

Tabel 2.3

Wilayah Administrasi Kota Bekasi

| No | Kecamatan | Kelurahan |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Kecamatan Bekasi Timur | 1. Kelurahan Bekasi Jaya 2. Kelurahan Aren Jaya 3. Kelurahan Duren Jaya 4. Kelurahan Margahayu |
| 2. | Kecamatan Bekasi Barat | 1. Kelurahan Jakasampurna 2. Kelurahan Bintara 3. Kelurahan Bintara Jaya 4. Kelurahan Kranji 5. Kelurahan Kota Baru |
| 3. | Kecamatan Bekasi Selatan | 1. Kelurahan Pekayon Jaya 2. Kelurahan Jakamulya 3. Kelurahan Kayuringin Jaya 4. Kelurahan Margaraya 5. Kelurahan Jakasetia |
| 4. | Kecamatan Rawalumbu | 1. Kelurahan Bojong Rawalumbu 2. Kelurahan Pengasinan 3. Kelurahan Bojongmenteng 4. Kelurahan Sepanjang Jaya |
| 5. | Kecamatan Bekasi Utara | 1. Kelurahan Kaliabang Tengah 2. Kelurahan Harapan Baru 3. Kelurahan Teluk Pucung 4. Kelurahan Perwira 5. Kelurahan Harapan Jaya 6. Kelurahan Margamulya |
| 6. | Kecamatan Medan Satria | 1. Kelurahan Medan Satria 2. Kelurahan Kali Baru 3. Kelurahan Pejuang 4. Kelurahan Medan Mulya |
| 7. | Kecamatan Jati Asih | 1. Kelurahan Jatimekar 2. Kelurahan Jatirasa 3. Kelurahan Jatiluhur 4. Kelurahan Jatiasih 5. Kelurahan Jatikrama 6. Kelurahan Jatisari |
| 8. | Kecamatan Jati Sampurna | 1. Kelurahan Jatisampurna 2. Kelurahan Jatirangga 3. Kelurahan Jatiraden 4. Kelurahan Jatikarya 5. Kelurahan Jatiranggon |
| 9. | Kecamatan Pondok Gede | 1. Kelurahan Jatiwaringin 2. Kelurahan Jatimakmur 3. Kelurahan Jatibaru 4. Kelurahan Jatibening 5. Kelurahan Jaticempaka |

| | 1 | 2 |
|-----|-------------------------|---|
| 10. | Kecamatan Bantar Gebang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Bantar Gebang 2. Kelurahan Ciketing Udik 3. Kelurahan Cikiwul 4. Kelurahan Sumur Batu |
| 11. | Kecamatan Pondok Melati | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Jatimelati 2. Kelurahan Jatiwarna 3. Kelurahan Jatirahayu 4. Kelurahan Jatimurni |
| 12. | Kecamatan Mustika Jaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Mustika Jaya 2. Kelurahan Mustiksari 3. Kelurahan Pedurenan 4. Kelurahan Cimuning |

Sumber: Pemerintah Kota Bekasi 2008.

B. Perangkat Pemerintahan

Sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 Kota Bekasi dipimpin oleh seorang walikota dengan perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai Sekretariat Daerah tipe A; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tipe A; Inspektorat tipe A; dan Dinas tipe A, meliputi:

Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; Dinas Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; Dinas Tenaga Kerja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;

Dilanjutkan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian. Dinas tipe B, terdiri atas: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; Dinas Perpustakaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; Dinas Kearsipan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan; Dinas Pertaniandan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Dinas tipe C, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Badan tipe A, terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan daerah; Badan Pendapatan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan daerah. Badan tipe B yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.³⁴

Adapun Penambahan beberapa Dinas sesuai dengan SOTK yang berlaku dan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang berlaku pada seluruh Provinsi dan Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia. Beberapa dinas yang ditambah antara lain, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan.³⁵

2.2.3 Kependudukan

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kota. Namun harus diakui secara empirik pertambahan penduduk kota terutama dari arus pendatang menimbulkan permasalahan baru yang cukup kompleks baik fisik maupun non fisik, terutama bagi kota yang tidak mempunyai daya dukung terhadap pertambahan penduduk. Fungsi Kota Bekasi yang

³⁴Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi.

³⁵*Berita Satu*, 11 Januari 2017. <http://www.beritasatu.com/megapolitan/408788-pemkot-bekasi-rombak-susunan-organisasi-tata-kerja-2017.html>. Diakses 12 Januari 2017 Pukul 15.10 WIB.

pada awalnya sebagai wilayah penyangga, bergeser menjadi wilayah penyeimbang Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi daya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 2 tarik bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Kota Bekasi tergolong sebagai wilayah yang padat penduduknya.

Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kota Bekasi 1.793.924. Sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.382.689. Tabel di bawah ini menunjukkan persebaran penduduk di Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin.³⁶

Tabel 2.4
Struktur Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

| Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jenis Kelamin | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Laki-Laki | | Perempuan | |
| | | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Bekasi Timur | 271.074 | 139.288 | 51,38 | 131.786 | 48,62 |
| Bekasi Barat | 288.278 | 148.493 | 51,51 | 139.785 | 48,49 |
| Bekasi Selatan | 319.164 | 163.869 | 51,34 | 155.305 | 48,66 |
| Bekasi Utara | 203.351 | 103.829 | 51,06 | 99.522 | 48,94 |
| Jatiasih | 211.918 | 108.422 | 51,16 | 103.496 | 48,84 |
| Pondok Gede | 157.156 | 80.785 | 51,40 | 76.371 | 48,60 |
| Jati Sampurna | 90.023 | 46.727 | 51,91 | 43.296 | 48,09 |
| Pondok Melati | 251.645 | 103.066 | 51,69 | 121.579 | 48,31 |
| Rawalumbu | 208.854 | 107.231 | 51,34 | 101.623 | 48,66 |
| Bantar Gebang | 93.780 | 48.285 | 51,49 | 45.498 | 48,51 |
| Medan Satria | 157.779 | 80.524 | 51,04 | 77.255 | 48,96 |
| Mustika Jaya | 129.667 | 66.921 | 51,61 | 64.746 | 48,39 |
| Jumlah | 2.382.689 | 1.224.430 | 51,41 | 1.158.259 | 48,59 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (2014)

³⁶ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2014

2.3 Profil TPST Bantar Gebang

2.3.1 Latar Belakang TPST Bantar Gebang

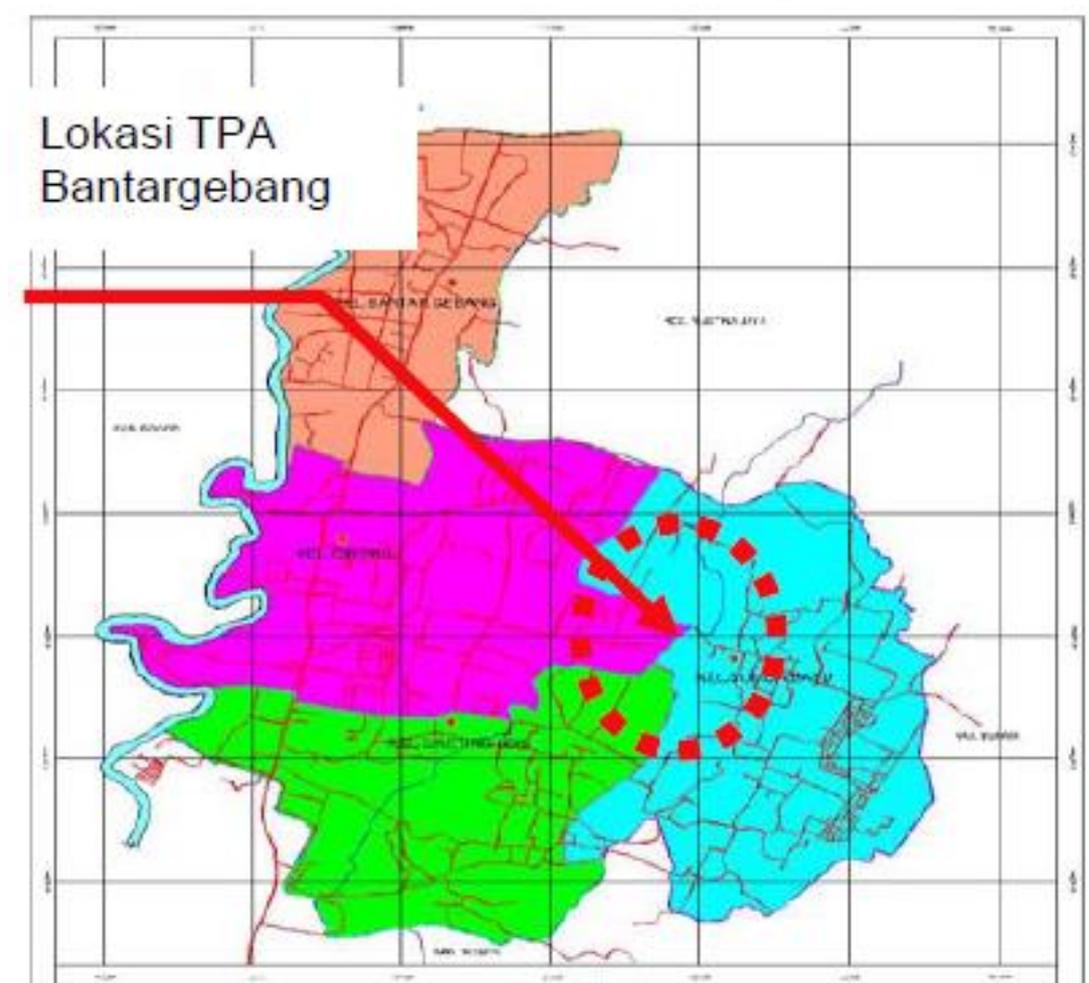
Area TPST Bantar Gebang terletak di lahan seluas 110,260 Ha dibawah penguasaa pemerintah DKI Jakarta, mencakup 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Ciketing udik, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumur Batu. Area Bantar Gebang ini semula adalah tanah bekas galian beberapa perumahan –perumahan di Jakarta salah satunya di daerah Podomoro, Kelapa Gading, Sunter serta perbaikan jalan Narogong. Sebelumnya nama TPST ini adalah TPA (Tempat Pembuangan Akhir), secara operasional pengelolaan sampah di TPA didasarkan Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 281 tahun 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah yaitu, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mengatur mengenai cara dan standar-standar pengelolaan sampah, maka nama TPA pun berubah dan sesuai dengan fungsinya menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah terpadu) Bantar Gebang³⁷

Pada awalnya, sistem pengolahan yang dilakukan pad TPST Bantar Gebang adalah sistem *open dumping* saat perubahan dari TPA menjadi TPST Bantar Gebang dilakukan juga perubahan sistem pengolahan yang tadinya menggunakan sistem *open dumping* sekarang menjadi sistem *Sanitary Landfill*. TPST Bantar Gebang menerima sekitar 1000 unit truk pengangkut sampah yang berasal dari TPS di 5 wilayah DKI Jakarta. Berat rata-rata sampah yang masuk sekitar 6500-7000 ton perhari.³⁸

³⁷ Marthin Hadi Juliansah (2010) *Analisis Keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi*, Tesis. Depok : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Hal.34

³⁸ Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Tahun 2011

Gambar 1.3
Peta Lokasi TPST Bantar Gebang



Sumber: Pemerintah Kota Bekasi (2009)

Awalnya luas lahan TPST Bantar Gebang 108 ha, kemudian bertambah 2,3 ha, sehingga sekarang luasnya 110,3 ha. TPST Bantar Gebang Dibagi 5 zona dengan pembagian zona I 18,3 ha, zona II 17,7 ha, zona III 25,41 ha, zona IV 11ha, zona V 9,5 ha. Luas zona 81,91 ha, sisanya digunakan untuk sarana dan prasarana seperti *buffer zone*, kantor dan penggunaan sarana yang lainnya

2.3.2 Pengelolaan Sampah

Operasional *sanitary landfill* terdiri dari beberapa proses, di antaranya³⁹:

1. Proses Penimbangan

Proses awal yang dilakukan saat sampah pertama kali dibawa masuk ke TPST Bantar Gebang oleh truk pengangkut adalah penimbangan berat sampah tiap truknya dengan menggunakan sistem jembatan timbang yang berada di tiap pintu masuk TPST Bantar Gebang. Truk sampah yang keluar masuk TPST Bantar Gebang kurang lebih 1000 truk perharinya dengan rata-rata bobot sampah 5500 – 6000 ton perharinya.

2. Pengangkutan ke Titik Buang

Setelah penimbangan, sampah dibawa ke zona titik buang yang merupakan zona aktif. Sebelum sampah diletakkan di lahan zona aktif, tanah dilapisi dengan geomembran yang berfungsi agar air lindi tidak menyerap ke dalam tanah dan tidak mencemari tanah. Pada zona aktif banyak terdapat pemulung yang memilah sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, bahan karet, dan sebagainya. Pihak pengelola TPST Bantar Gebang membatasi jumlah pemulung yang boleh masuk ke zona aktif untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan seperti misalnya tertimbun tumpukan sampah yang longsor, terlindas alat berat, dan lain sebagainya. Peletakan sampah di lahan zona aktif dilakukan secara estafet dengan menggunakan eskavator. Dengan menggunakan sistem estafet ini diharapkan persebaran tumpukan sampah di zona aktif ini dapat merata dan tidak menumpuk hanya di beberapa bagian saja. Ketinggian tumpukan sampah bisa mencapai 25 sampai 30 meter. Pada puncak tumpukan/gunungan sampah terdapat buldozer yang berfungsi untuk meratakan tumpukan/gunungan sampah menjadi berbentuk sengkedan agar tidak terlalu

³⁹ *Ibid.*

tinggi dan mencegah terjadinya longsor. Selanjutnya tumpukan/gunungan sampah yang sudah di padatkan dan ditutupi dengan tanah merah hingga tertutup seluruhnya.

3. *Cover Soil*

Setelah tinggi tumpukan/gunungan sampah mencapai kurang lebih 25 meter, dilakukan penutupan (*cover soil*) dengan menggunakan tanah merah. Tanah merah yang digunakan biasanya didapat dari daerah sekitar TPST Bantar Gebang. Metode penutupan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai hal seperti mengurangi faktor penyakit (lalat, belatung), mencegah terjadinya pencemaran udara akibat gas metan yang dihasilkan oleh tumpukan sampah tersebut. Penggunaan tanah merah sebagai media *Cover Soil* bertujuan agar mempercepat proses penguraian sampah. Dengan ditutupnya tumpukan sampah dengan tanah merah ini, dapat menurunkan ketinggian sampah hingga 30%. Setelah beberapa bulan, ketinggian gunung sampah yang sudah tertutupi sampah akan menurun dan apabila sudah mencapai ketinggian kurang lebih 10 meter, tanah akan digali kembali dan akan digunakan sebagai zona aktif *sanitary landfill*.

4. Penambahan Pipa Ventilasi

Pada tumpukan/gunungan sampah di zona aktif, perlu dilakukan penambahan pipa ventilasi di sejumlah bagian dengan tujuan untuk mengeluarkan dan mencegah gas metan yang terkonsentrasi dibawah tumpukan tanah terkonsentrasi, mengalami kejenuhan, dan nantinya dapat terekspansi bahkan meledak. Pipa yang digunakan untuk mengeluarkan gas metan dari tumpukan/gunungan sampah pada TPST Bantar Gebang adalah pipa dengan jenis HDPE yang ditanam dan dapat mengalirkan gas metan samapi ke power plant.

2.2.4 Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS)

Pada TPST Bantar Gebang, terdapat 3 Unit IPAS. Sistem IPAS menggunakan activated sludge system, yaitu danau yang diberi aerasi dengan agitator (pengaduk bertenaga besar). Operasional IPAS dan kebersihan drainage perlu dikontrol dengan baik setiap hari agar tidak terjadi klaim dari masyarakat tentang kualitas air buangan. Setiap harinya, IPAS Bantar Gebang mengelola air lindi dengan debit masuk sebesar $\pm 150\text{m}^3/\text{hari}$ dan debit keluar sebesar $\pm 80\text{m}^3/\text{hari}$. Air Lindi tersebut berasal dari landfill yang terdiri dari beberapa zona di TPST Bantar Gebang. Setiap Landfill dipasang pipa bawah tanah untuk mengalirkan air lindi di zona tersebut ke area IPAS. Meskipun pada awal tahun 2017 hanya satu IPAS yang beroperasi.

2.2.5 Unit Pengomposan

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang memiliki proses pengomposan sampah organik yang baik. Pabrik kompos pada TPST Bantar Gebang mampu memproduksi 35 sampai 50 ton pupuk per hari dari potensi sampah yang bisa diolah menjadi pupuk sebanyak 200 ton. Harga pupuk yang ditawarkan tergolong murah yaitu Rp 400,00 /kg, sementara yang dicampur dengan bahan-bahan alami lain dengan kualitas terbaik dijual Rp1.000,00/kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pupuk urea bersubsidi. TPST ini telah melakukan pemilahan sampah dengan baik, sehingga tidak susah untuk mengumpulkan lalu mengolah sampah organik yang ada yang kemudian akan dijadikan pupuk kompos. Alat yang digunakan pada proses komposting merupakan alat yang diciptakan dan dibuat sendiri.

2.2.6 Power Plant

Power Plant Bantar Gebang merupakan program kerja sama antara PT. Godang Tua dengan PT. Navigate Organic Energy Indonesia (PT. NOEI). Pada TPST Bantar Gebang terdapat 2 unit *Power Plant* yang berasal dari Austria Pembangkit listrik ini memanfaatkan gas

metan yang ditangkap dari *sanitary landfill*. Sampah pada *sanitary landfill* diolah terlebih dahulu melalui proses penguraian, penutupan, dan pemanasan sehingga sampah akan menghasilkan gas metan. Gas metan yang dihasilkan ditangkap dan dialirkan ke generator *Power Plant*. Untuk mengalirkan gas metan ini, digunakan pipa HDPE yang dibangun hingga mencapai panjang 60 m. Alur energi yang diolah pertama-tama berasal dari tumpukan sampah yang dihubungkan dengan pipa. Kemudian gas yang dihasilkan disedot dengan *blower* menuju unit *power plant*. Setelah itu gas metan masuk ke engine dan menjadi bahan bakar untuk genset. Dari sini gas metan telah berubah menjadi energi listrik dan dijual langsung ke PLN. Di dalam unit *Power Plant* ini, terdapat 10 GGPC dengan kapasitas masing-masing alatnya berkisar antara 1197 sampai 2000 kilowatt dengan kapasitor yang berbeda-beda tergantung dengan mesinnya.. Generator yang digunakan dapat membakar gas metan CH₄ dan mengubahnya menjadi listrik. Jumlah listrik yang dihasilkan per harinya sampai saat ini kurang lebih sekitar 7.6 megawatt.

Pada perencanaannya, pengelola menargetkan untuk menaikkan produksi listrik yang dihasilkan oleh TPST Bantar Gebang hingga 8 megawatt yang rencananya akan di transfer untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Bali. Mesin *power plant* ini membutuhkan gas metan hasil olahan dari sekitar 1000m³ sampah untuk menghidupkan dan menggerakkan per jamnya. Pada unit ini, mesin digerakkan 24 jam nonstop dimulai dari tahun 2008. Tiap pekerja diharuskan untuk memakai seragam dan sepatu boot sebagai alat perlindungan diri. Diwajibkan bagi para pekerja yang bekerja dalam ruangan untuk memakai alat penutup telinga untuk perlindungan dari kebisingan.